

**Implementasi Pemerintah Kota Depok Dalam Upaya Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Menurut Pasal 33 UUD '45**

**Surahman ([surahmanrama@gmail.com](mailto:surahmanrama@gmail.com))  
Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Nasional Laa Roiba**

**Evinovita ([evinovita@al-kharaj.net](mailto:evinovita@al-kharaj.net))  
Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Nasional Laa Roiba**

**Dessy Damayanthi ([dessydamayanthi@al-kharaj.net](mailto:dessydamayanthi@al-kharaj.net))  
Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Nasional Laa Roiba**

**ABSTRACT**

*The study aims to find out how the city government implementation development of Depok in an effort to boost the public economy according to article 33 of 1945 of Islamic studies. The writer wants to know some factors that are an impediment and success in the Depok city's efforts to boost the economy is good. The method of research is using a qualitative method, as for this research instrument is an interview, observation, documentation, a printed purpose associated with the title of the thesis that then gained a validity of the data. From the data gathered on the results of the study above. Thus the writer concluded that the separate town of Depok from the town of Bogor was in the economic structure, development, transportation, education, natural resources and human resources and technology can flourish well.*

**Keyword: development, research, economic structure**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perkembangan implementasi pemerintah Kota Depok dalam upaya meningkatkan ekonomi masyarakat menurut Pasal 33 Undang – Undang Dasar 1945 dalam studi Islam. Penulis ingin mengetahui beberapa faktor yang menjadi penghambat dan keberhasilan dalam upaya pemerintah Kota Depok untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dengan baik. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif, adapun instrumen penelitian ini adalah wawancara, observasi, dokumentasi, tujuan kepustakaan yang terkait dengan judul skripsi yang kemudian memperoleh keabsahan data. Dari data yang terkumpul berdasarkan hasil penelitian tersebut diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa terpisahnya Kota Depok dari kota Bogor dalam struktur ekonomi, pembangunan, transportasi, pendidikan, Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia serta teknologi dapat berkembang dengan baik

**Kata kunci: perkembangan, penelitian, struktur ekonomi**

## **A. PENDAHULUAN**

Wilayah Kota Depok adalah kota yang letaknya sangat strategis dan dekat dengan kota Jakarta. Kota Depok memiliki tujuh tantangan besar yang harus kita hadapi yang merupakan hambatan serta dapat melumpuhkan harapan dan aspirasi kita untuk masa depan.

Pertama dan mungkin yang paling penting dari semuanya adalah menipisnya kualitas Sumber Daya Manusia. Kedua Kota Depok akan menghadapi peningkatan eksponensial dalam jumlah populasi yang sangat besar, suatu kondisi yang disebut sebagai ledakan penduduk. Ketiga Kota Depok menghadapi isu pemerintah yang lemah tidak efisien dan korup. Keempat adanya ketidakseimbangan struktural perekonomian. Kelima tingginya tingkat kesenjangan sosial yang semakin memperihatinkan. keenam tingginya angka pengangguran di masyarakat serta pelayanan birokrasi yang semakin sulit. Dan yang ketujuh masih banyak penduduk yang belum mengenyam pendidikan dan kurang syi'arnya pendidikan agama islam.

Jika pihak terkait dan pemerintahan Kota Depok tidak memiliki dorongan, imajinasi, keinginan untuk berinovasi dan ketegasan untuk mencapai terobosan dalam pembangunan dan pemerataan serta kesejahteraan ekonomi masyarakat, maka bahaya yang dihadapi pemerintahan Kota Depok akan semakin menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan, semua kemajuan dan prestasi sosial, politik, ekonomi, budaya dan pembangunan telah dicapainya selama ini.

Setiap tahunnya ledakan penduduk yang sangat besar dari berbagai aneka ragam bahasa dan warna kulit sekitar 1,6 persen. Untuk menempatkan hal ini, setiap tahunnya keberadaan masyarakat Kota Depok 6 kali lipat jumlahnya dibandingkan dengan kota-kota yang lainnya.

Jika Kota Depok tidak bisa mengendalikan pertumbuhan penduduk melalui program berencana, maka kesenjangan sosial akan sulit di atasi terutama tingkat kebutuhan primer dan sekunder dan tersier / lux.

Taman wisata yang perlu adanya perhatian khusus oleh pemerintahan Kota Depok yang merupakan asset masyarakat harus ditingkatkan baik itu dari kebersihan, penataannya, keamanan dan kenyamanannya serta sumber air bersih yang sangat dibutuhkan masyarakat.

## **B. TINJAUAN PUSTAKA**

### **Pengertian Implementasi Kebijakan Pemerintah**

Implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu - individu atau pejabat - pejabat atau kelompok - kelompok pemerintah atau swasta yang di arahkan pada tercapainya tujuan - tujuan yang telah di gariskan dalam keputusan kebijakan.

Menurut Mazmanian dan Sabatier dalam bukunya Agustino(2008:196) penerbit Aksara Jakarta menjelaskan bahwa : Implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk pemerintah - pemerintah atau keputusan - keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah - masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan dan sasaran yang ingin di capai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya.

Menurut Lester dan Stewart dalam Agustino (2008:196) mengatakan : implementasi kebijakan sebagai tahap penyelenggaraan kebijakan segera setelah ditetapkan menjadi undang - undang. Dalam pandangan luas implementasi kebijakan diartikan sebagai pengadministrasian undang-undang kedalam berbagai sektor organisasi, prosedur, dan teknik - teknik yang bekerja secara bersama - sama untuk mencapai tujuan dan dampak yang ingin diupayakan oleh kebijakan tersebut.

implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam keseluruhan struktur kebijakan karena melalui prosedur ini proses kebijakan secara keseluruhan dapat dipengaruhi tingkat keberhasilan atau tidaknya pencapaian tujuan. Menurut Bressman dan Wildansky dalam Agustino (2008:198) menyatakan bahwa:

### **Model Implementasi Kebijakan**

Sejarah perkembangan top down dan pendekatan *bottom up*. Pendekatan top down misalnya dapat disebut sebagai pendekatan yang mendominasi awal perkembangan studi implementasi kebijakan dijelaskan tentang adanya dua pendekatan guna memahami implementasi yaitu: Dalam pendekatan tentasi kebijakan, walaupun di kemudian hari terdapat perbedaan - perbedaan sehingga menelurkan pendekatan botton up. Namun pada dasarnya dua pendekatan ini bertitik tolak pada asumsi - asumsi yang sama dalam mengembangkan kerangka analisis tentang studi implementasi. Inti dari kedua pendekatan ini adalah sejauh mana tindakan para pelaksana (administrator dan birokrat) sesuai dengan prosedur serta tujuan yang telah digariskan oleh para pembuat kebijakan. Ada beberapa jenis model kebijakan diantaranya adalah :

### **Model Impementasi Kebijakan menurut Van Metter dan Van Horn**

Model implementasi kebijakan yang dirumuskan oleh Van Metter dan Van Horn menjelaskan bahwa proses implementasi kebijakan merupakan sebuah abstraksi atau ferformansi yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi dan dipengaruhi oleh enam variabel, yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik, agen pelaksana, sikap dan kecendrungan para pelaksana, komunikasi, antarorganisasi, dan lingkungan sosial, serta ekonomi dan politik.

### **Model implementasi Kebijakan Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier.**

Model implementasi yang dikemukakan oleh Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier disebut dengan AFramework for PolicyImplementation. Analysis. Model ini berpendapat bahwa peran penting dari Implementasi kebijakan publik adalah kemampuannya dalam mengidentifikasi variable - variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan - tujuan formal pada keseluruhan proses

implementasi. Variabel - variabel yang dimaksud dapat diklasifikasikan menjadi tiga katagori besar, yaitu:

- a. Mudah tidaknya masalah yang akan digarap, meliputi kesukaran- kesukaran teknis, keberagaman perilaku yang diatur, tingkat dan ruang lingkup perubahan perilaku yang dikehendaki.
- b. Kemampuan kebijakan menstruktur proses implementasi secara cepat.
- c. Faktor-faktor diluar undang - undang yang mempengaruhi implementasi.

### **Model Implementasi Kebijakan George C. .Edwar**

Model pendekatan top down dalam menganalisa implementasi kebijakan model ini berfokus pada empat variabel yang dianggap menentukan proses implementasi kebijakan, yaitu: komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi.

### **Model Implementasi Kebijakan Eguene Bardach.**

Model implementasi kebijakan dengan menggunakan implementasi kebijakan yang dikemukakan Eguene Bardach dalam melakukan analisa lebih menekankan kepada tawar menawar, persuasi, dan manufer oleh kelompok - kelompok kepentingan guna memaksimalkan pengaruh mereka dalam hal pelaksanaan atau implementasi.

### **Model Implementasi Kebijakan Christofher Hood**

Model implementasi kebijakan yang di rumuskan oleh Christofher Hood, dalam bukunya *Limit To Administration* menjelaskan bahwa sekurang - kurangnya terdapat lima syarat agar implementasi kebijakan dapat berlangsung sempurna, yaitu: Implementasi adalah produk dari organisasi yang padu seperti militer dengan garis komando yang jelas, norma - norma yang ditegakkan dan tujuan ditentukan dengan jelas, orang- orangnya dipastikan dapat melaksanakan apa yang diminta, harus ada komunikasi yang sempurna didalam dan antar organisasi, tidak ada tekanan waktu.

### **Model Implementasi Kebijakan Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn**

Model implementasi ini sangat menekankan pentingnya pendekatan Top-Down<sup>(2)</sup> Dalam proses implementasinya, bagi mereka pendekatan bottom - Up cenderung mendekati permasalahan kasus perkasus dianggap tidak menarik apalagi para membuat kebijakan adalah orang-orang yang telah dipilih secara demokratis. Model implementasi kebijakan ini memberikan proposisi-proposisi untuk mencapai implementasi yang sempurna, sebagai berikut: Situasi diluar badan atau organisasi tidak menimbulkan kendala besar bagi proses implementasi, tersedia cukup waktu dan sumberdaya untuk melaksanakan program, tidak ada kendala dalam menyediakan sumberdaya yang dibutuhkan termasuk sumberdaya yang dibutuhkan dalam setiap tahapan implementasi, kebijakan yang diimplementasikan didasarkan pada teori sebab akibat yang valid, hubungan sebab akibat tersebut setidaknya ada hubungan antara(intervening Link), diimplementasikan oleh lembaga tunggal yang tidak tergantung pada lembaga lainnya.

### **Faktor - faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan**

Menurut Van Metter dan Van Horn dalam bukunya Agustino ( 2008:142) menjelaskan bahwa : ada enam faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu:

a. Ukuran dan tujuan kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika dan hanya ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosial yang ada di level pelaksanaan kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal untuk dilaksanakan pada level warga, maka agak sulit merealisasikan kebijakan publik pada level yang dikatakan berhasil.

b. Sumberdaya Manusia

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia. Manusia merupakan sumberdaya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi.

c. Karakteristik agen pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlihat dalam implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Selain itu cakupan atau luas wilayah implementasi kebijakan juga perlu di perhitungkan mana kala hendak menentukan agen pelaksana. Semakin luas cakupan implementasi kebijakan, maka seharusnya semakin besar pula agen yang dilibatkan.

d. Sikap kecenderungan (disposition) para pelaksana

Sikap penerimaan atau penolakan dari pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan.

e. Komunikasi antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

Kordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan public. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi dan begitu pula sebaliknya.

f. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik.

Hal terakhir yang juga perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi kebijakan adalah sejauhmana lingkungan eksternal turut keberhasilan kebijakan public yang telah ditetapkan. karena itu lingkungan ekonomi, social dan politik yang kondusif juga perlu diperhatikan dalam proses implementasi kebijakan.

### **Ilmu Ekonomi menurut Aristoteles dan Islam**

Ilmu ekonomi merupakan seni yang tertua didunia. Istilah ekonomi sendiri berasal dari bahasa Yunani Oikos Nomos, yang berarti tatalaksana rumah tangga. Tokoh pertama yang menulis permasalahan ekonomi adalah Aristoteles dari Yunani sehingga orang sekarang menyebutnya sebagai ahli ekonomi pertama. sesudah melalui masa yang sangat panjang barulah ilmu ekonomi mendapatkan bentuk serta definisi seperti sekarang ini. Di sini, Ilmu ekonomi diartikan sebagai ilmu untuk memenuhi keinginan manusia yang tidak terbatas dengan sumberdaya yang terbatas, ternyata masalah utama dan setiap persoalan ekonomi adalah problem of choice ( masalah pemilihan) diantara berbagai alternatif penggunaan suatu barang.

Sementara itu masalah perekonomian yang paling pokok meliputi tiga masalah yang fundamental dan saling terkait yakni, *what, how, dan for whom, goods should be produced*, yang secara lengkap menunjukkan hubungan yang erat antara produksi dengan konsumsi.

Perjalanan ilmu ekonomi tidak berhenti dengan revolusi Adam Smith dan di susul oleh mereka yang melihat kelemahan teorinya. Para ahli ekonomi Jerman, dimotori oleh Marx, merasa amat kecewa dengan kinerja Liberalisme yang meletakkan rakyat sebagai sapi perahan. Merekapun lalu memunculkan aliran ekonomi baru yang disebut komunisme. Di barat muncul aliran Keynesian menjawab kegagalan liberalism yang dimunculkan oleh Adam Smith yang telah melahirkan malaise, bahkan masih mengalami kegagalan terjadi dimana-mana. Rupanya umat manusia sedang menunggu lahirnya sebuah aliran baru. Sedangkan Pengertian Ekonomi menurut agama Islam adalah : Ekonomi Islam dapat didefinisikan sebagai cabang ilmu yang membantu merealisasikan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumberdaya yang langka, yang sejalan dengan ajaran Islam tanpa membatasi kebebasan individu ataupun menciptakan ketidak seimbangan makro ekonomi secara logis.

Adapun dalam pandangan Islam, ekonomi / iqtishad berasal dari kata “ qosdun “ yang berarti keseimbangan ( equilibrium ) dan keadilan ( *equally balanced* ). Kata – kata al-qashdu dalam Al-Quran dan Hadist sebagai berikut :

Dimaknai sebagai “ sederhana “ yang berarti sederhanakanlah dalam berjalan. “ menurut Tafsir Ibn Katsir ( 6/342 ) dan juga Al-Qurtuby ( 14/17 ) berarti pertengahan, tidak cepat dan juga lambat. Dimaknai juga dengan “ pertengahan “, yang berarti diantara mereka terdapat golongan pertengahan, “maka iqtishad adalah pertengahan dalam bekerja, yang berarti tidak bakhil, pelit, dan berlebih – lebihan.

Iqtishad berarti jalan yang lurus, artinya “ dan Haq bagi Allah ( menerangkan ) jalan yang lurus, dan diantara jalan-jalan yang bengkok. Jikalau dia menghendaki, tentulah dia memimpin kamu semuanya ( kepada jalan yang benar ).”

Dan yang terakhir, iqtishad adalah dimaknai dengan dekat dalam Al-Qur’an, yang artinya: “kalau yang kamu serukan kepada mereka itu keuntungan yang mudah diperoleh dan perjalanan yang tidak berapa jauh, pastilah mereka mengikutimu, tetapi tempat yang dituju itu amatlah jauh terasa oleh mereka” dibantu Al-Qur’an dan Sunnah, akal ( ijtihad ) dan pengalaman.

Dalam pandangan tauhid, manusia sebagai pelaku ekonomi hanyalah sekedar pemegang amanah oleh sebab itu, manusia harus mengikuti ketentuan Allah dalam segala aktifitasnya, termasuk aktifitas ekonomi. Ketentuan Allah yang harus di patuhi dalam hal ini tidak bersifat mekanistik dalam alam kehidupan sosial, tetapi juga yang bersifat teologis (uluhiyyah) dan moral (khuluqiyah).

Ada tiga aspek yang sangat mendasar dalam ajaran Islam , yaitu aspek aqidah ( tauhid ), hukum ( syari’ah ), dan akhlak. Ketika seseorang memahami tentang ekonomi Islam secara keseluruhan maka ia harus memahami dan mengerti tentang ekonomi Islam ketiga aspek tersebut.

Menjaga kemaslahatan bisa dengan cara min haytsu al-wujud dan min haytsu al-adam. Menjaga kemaslahatan tersebut dengan cara mengusahakan segala bentuk aktifitas dalam ekonomi yang bisa membawa kemaslahatan.

Adapun hubungan Sunnah dengan Al-Qur’an adakalanya mengukuhkan hukum yang ada dalam Al-Qur’an. Dengan demikian, sumber terpenting peraturan atau perundang – undangan

perekonomian Islam adalah Al-Qur'an dan Sunnah, meskipun demikian sangat disayangkan sampai saat ini suatu literature yang mengupas tentang system ekonomi Islam secara menyeluruh.

Sistem ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang mandiri dan terlepas dari system ekonomi yang lain. Adapun yang membedakan antara system ekonomi Islam dan system ekonomi lainnya adalah : pertama asumsi dasar/norma pokok atau pun aturan main dalam proses maupun interaksi kegiatan ekonomi yang diberlakukan. Dalam sistem ekonomi Islam yang menjadi asumsi dasarnya adalah syari'at Islam tersebut di berlakukan secara menyeluruh individu, keluarga dan kelompok masyarakat, usahawan baik untuk kebutuhan jasmani maupun rohani.

Kedua.Prinsip ekonomi Islam adalah penerapan asas efisiensi dan manfaat dengan tetap menjaga kelestarian alam. Ketiga Motif ekonomi Islam adalah mencari keberuntungan baik didunia maupun di akhirat dengan jalan beribadah dalam arti yang luas.

Hal tersebut didasarkan kepada ketentuan yang terdapat di dalam perintah yang terdapat dalam ajaran Islam, yaitu : Ajaran Islam dilaksanakan secara totalitas perintah ajaran Islam dilaksanakan di dalam keseluruhan kegiatan umat Islam dasar perintah tersebut adalah “ Hai orang-orang yang beriman masuklah kamu dalam Islam secara keseluruhan dan janganlah kamu ikut jejak langkah setan, sungguh ia musuh yang nyata bagimu. (QS. Al-Baqarah :208). Agama Islam ingin masyarakat yang berkehidupan sejahtera baik di dunia maupun diakhirat.

### **Masalah Ekonomi**

Menurut pengertian ilmu ekonomi yang merupakan ilmu pemenuhan keinginan manusia yang tidak terbatas dengan sumberdaya yang terbatas maka yang menjadi permasalahan utama adalah ketidak terbatasan keinginan manusia yaitu :

1. Ketidak terbatasan keinginan manusia

Manusia sebagai mahluk yang tidak pernah puas selalu menginginkan hal-hal diluar kebutuhan dalam kehidupannya. Menurut Maslaw berpendapat setelah kebutuhan psikologis, keamanan, social dan harga diri manusia, pasti menginginkan aktualisasi diri, hal ini bersifat tidak terbatas yang pada akhirnya akan membuat manusia tidak pernah puas.

2. Keterbatasan sumberdaya

Hal ini dapat diderivikasikan ke dalam tiga pokok pembahasan yaitu: distribusi sumberdaya yang tidak merata antara individu yang merupakan salah satu penyebab kelangkaan relative. sumberdaya ini meliputi sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia.

Bentuk ketidakmerataan ini antara lain adanya ketidak samaan potensi sumberdaya yang dimiliki oleh masing-masing daerah, misalnya daerah Cibinong Bogor banyak terdapat perusahaan - perusahaan industri sedangkan di daerah Depok masih jarang perusahaan industri.

2. Keterbatasan Sumberdaya manusia

Manusia, sekalipun sebagai mahluk yang sempurna di bandingkan dengan mahluk yang lainnya didunia, tetapi memiliki keterbatasan dan kemampuan mengolah kekayaan alam dan yang lainnya. Untuk memecahkan persoalan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari manusia haruslah bertindak dan berbuat. Apapun perbuatan itu untuk mencukupi kebutuhan pribadinya maupun untuk meraih keuntungan dalam usahanya, disebut sebagai perbuatan ekonomi.

Meskipun demikian, Islam tidak menghendaki pemeluknya menjadi mesin ekonomi yang melahirkan budaya materialism. Kegiatan ekonomi dalam Islam tidak semata-mata bersifat materi saja, tetapi lebih dari itu bersifat materi plus. Rakus terhadap kekayaan dan sikap mementingkan materi belaka sangat tercela. Al Qur'an dan hadist mengingatkan kita.

*Berpalinglah wahai Muhammad dari orang-orang yang berpaling akan peringatan kami, dan yang hanya mendahulukan kepentingan duniawi saja (QS. An-Najm : 29).*

*Siapa yang menghendaki keuntungan duniawi saja, maka kami berikan keuntungan itu kepadanya, dan dia tidak akan mendapatkan apapun diakhirat kelak (QS. As-Syurah:20).*

### C. METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi Penelitian adalah proses atau cara ilmiah untuk mendapatkan data yang akan digunakan untuk keperluan penelitian. Metodologi juga merupakan analisis teoritis mengenai suatu cara atau metode. Metode yang di gunakan adalah metode deskriptif analisa dengan pendekatan kualitatif yaitu menganalisa data – data kualitatif yang di peroleh dari WaliKota Depok data primer dan data sekunder. Dengan Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui percakapan langsung dalam hal ini Kabag HUmAs WaliKota Depok, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi

### D. HASIL PEMBAHASAN

#### **Pengembangan Peran WaliKota Depok Dalam Pembangunan Ekonomi**

Secara umum, kebijakan pembangunan ekonomi daerah waliKota Depok sudah sangat memadai, terlihat dari berbagai kecamatan dan beberapa kelurahan yang terus menerus adanya perbaikan baik secara struktural infrastruktur, ekonomi di masyarakat, pelayanan kepada masyarakat serta dapat mengurangi pengangguran, kebijakan pemerintah Kota Depok telah mengalami peningkatan walaupun sedikit demi sedikit, hal ini dapat di rasakan masyarakat di berbagai lingkungan baik di tingkat kecamatan maupun ditingkat kelurahan, meskipun telah mengalami peningkatan dari pendapatan daerah (APBD). Ada beberapa hal yang harus diperhatikan secara serius terutama kebijakan pembangunan ekonomi yang tidak tepat sasaran serta pembenahan - pembenahan di bidang pendidikan terutama pendidikan agama Islam dan keterampilan masyarakat, baik dilingkungan kecamatan, kelurahan dan di kantor wali Kota Depok sendiri..

Padahal sudah jelas, otonomi daerah bertujuan agar berbagai kebijakan pembangunan bisa menyerap peran serta masyarakat dan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan ekonomi dan mengembangkan pendidikan agama Islam. Dalam konteks ini pemerintah hanya berupaya mewujudkan keseimbangan politik (*political*), akuntabilitas pemerintah local ( local accountability) dan pertanggung jawaban pemerintah local (*local resvonsiveness*) kepada pusat.

Mengutip dari pendapat Kuncoro (2004), salah satu pokok yang harus diperhatikan dalam rangka menerapkan pembangunan ekonomi daerah menurut studi Islam yang lebih komprehensif ini adalah bagaimana proses identifikasi pundamental ekonomi menurut studi Islam dilakukan

secara lebih realitas. Dalam pembangunan ekonomi baik jangka pendek maupun pembangunan ekonomi jangka panjang terutama menurut studi Islam. Bagaimana pembangunan ekonomi secara tepat sasaran, dimana hal itu harus dicapai secara serentak dan bukan secara dimensi yang terpisah.

Visi pengentasan kemiskinan dan pengurangan pengangguran harus lebih ditingkatkan baik dari taman wisata, budaya, ekonomi, pertanian dan perkebunan, perdagangan, politik, pertahanan dan keamanan. Akibatnya pembangunan ekonomi berjalan statis. Berbagai bantuan dari pusat tidak sedikit yang tidak tepat sasaran dan justru dijadikan lahan penyelewengan atas dasar ketidak tepat sasaran itulah kebijakan pemerintah Kota Depok dengan mendasarkan diri pada analisis input dan output. Mengingat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. yang dilakukan diawal priode, merekomendasikan untuk kembali pada pengembangan sektor basis. dengan agenda utama Peran

WaliKota Depok berupaya untuk meningkatkan ekonomi melalui berbagai program dan kegiatan pembangunan Walikota dan jajarannya saat ini berpijak untuk melakukan revitalisasi besar – besaran bidang pertanian, perkebunan, perikanan, taman wisata, peternakan, rumah layak huni, dibidang jasa transportasi dan sarana – sarana ibadah serta infrastruktur yang lainnya dan di yakini sebagai sektor dasar masyarakat Kota Depok.

Pemerintah Kota Depok berupaya untuk membantu dan meningkatkan pengembangan di bidang tersebut menuju kesejahteraan bagi masyarakat. Dengan memberikan dukungan seluas-luasnya. Pengembangan di bidang tersebut diawali dengan banyaknya melakukan pembangunan proyek proyek rumah layak huni, sarana dan prasarana baik jasa dibidang transportasi dan pendidikan. Bantuan berupa investasi terkait pada pertanian menuju perkebunan, industri, jasa, pendidikan baik formal maupun non formal terlebih dan yang paling diutamakan adalah menerapkan kebijakan pemerintah dalam pembangunan ekonomi yang lebih komperhensif adalah terjadinya proses identifikasi fundamental ekonomi Islam secara lebih realistis diKota Depok yang menitik beratkan pada pendidikan akhlak, agama serta ekonomi yang menyeluruh demi kesejahteraan masyarakat Kota Depok.

Peningkatan lajunya pertumbuhan penduduk, pertumbuhan ekonomi baik di tingkat kecamatan maupun di kelurahan, peningkatan pendapatan perkapita, pengurangan terhadap angka kemiskinan, kesenjangan sosial, pengurangan angka pengangguran, ketimpangan secara signifikan.

Secara teoritis model kebijakan yang berdasarkan pendekatan pertumbuhan ekonomi (economic growth) memerlukan partisipasi masyarakat sebagai tiang penyanggahnya. Hal ini di pahami karena penekanan pada pertumbuhan ekonomi semata seringkali menimbulkan dampak negatif, dimana tidak semua masyarakat dapat menikmati pertumbuhan yang di maksudkan. Hal ini sudah terbukti ketika pertumbuhan ekonomi di daerah cukup pesat ternyata justru tidak meningkatkan pendapatan perkapita di masyarakat secara stabil. Pesatnya pendapatan asli di daerah seringkali hanya merupakan momentum sesaat dimana hal tersebut tidak berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.

Dalam kebanyakan kasus di lapangan, seringkali para pengambil kebijakan terjebak pada kebiasaan “ tergesah-gesah dalam menyusun kebijakan pembangunan.” Hal ini terasa wajar jika mengingat tuntutan keterbatasan waktu rencana penyusunan pembangunan daerah, jika diterapkan dalam peraktek pembangunan daerah, akan menggunakan uang rakyat dan berdampak pada kondisi realitas yang digarapnya. Jadi, apapun kondisinya, rencana pembangunan daerah Kota Depok harus

disusun secara bertanggung jawab dan serasional mungkin mengingat besarnya dana dan dampak yang dihasilkan.

Untuk kasus kebijakan pembangunan ekonomi Islam di daerah pemerintahan waliKota Depok, rumusan masalah pembangunannya ialah mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, demokratis dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi sesuai dengan potensi daerah guna mengatasi masalah kemiskinan, pengangguran, lajunya tingkat pertumbuhan penduduk, rumah layak huni,

Kesenjangan sosial didekati dengan upaya meningkatkan moralitas terutama di bidang agama Islam, meningkatkan pendidikan baik formal maupun non formal serta pendapatan perkapita masyarakat yang lebih tinggi. Sedangkan tujuan pembangunan ekonomi yang hendak dicapai ialah menciptakan pembangunan yang berkelanjutan, untuk memecahkan masalah pembangunan sehingga tujuan pembangunan bisa tercapai, maka dilaksanakan proses pembangunan di berbagai sektor terutama di bidang ekonomi menurut studi Islam.

Pemerintah WaliKota Depok pada masa priode sebelumnya, terjadi penurunan pemanfaatan dan pengelolaan lahan produktif sehingga pada sector pertanian, wisata dan sebagainya terjadi stagnasi bahkan cenderung mengalami penurunan produktivitas. Disisi lain, eksploitasi sumberdaya alam yang besar-besaran di masa lalu telah membuat keberadaannya bisa dikatakan hamper habis, seperti lahan pertanian, perkebunan, peternakan, agro wisata. Pada pembangunan priode sekarang ini diupayakan untuk memanfaatkan lahan-lahan tidur tersebut agar produktif dan menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat Kota Depok.

### **Model Pendekatan Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah WaliKota Depok**

Proses pembangunan pada intinya adalah proses transformasi kondisi realitas yang lama menuju kondisi realitas yang baru. jadi, jika proses pembangunan itu mencakup bidang ekonomi, maka sesungguhnya proses itu hendak mentransformasi kondisi realitas ekonomi daerah depok yang lama menuju kondisi realitas ekonomi yang baru yang lebih kualitatif atau lebih bermutu.

Strategi peningkatan kesejahteraan ini akan mengarahkan keinvestasi kearah pelayanan sosial yang menghasilkan keuntungan dalam bentuk tersedianya fasilitas kesehatan, pendidikan, penjagaan kesehatan, perubahan dan seterusnya. bagaimanapun, infrastruktur dan program dirumuskan melalui mekanisme terpusat. Pola kepemimpinan kepala daerah saat ini berupaya menekankan pada aspek kebaikan dari masing-masing pendekatan. Pemerintah menggunakan pendekatan teknokratis di satu sisi untuk membantu masyarakat, menemukan dan mengidentifikasi masalah dalam dirinya.

Dalam konteks ini, di lapangan masih menghadapi kendala karena kenyataannya adalah masyarakat ternyata belum bisa merumuskan kebutuhan pembangunan ekonomi atau masalah sendiri. Hal ini terbukti dengan usulan pembangunan yang kurang jelas kemanfaatannya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi.

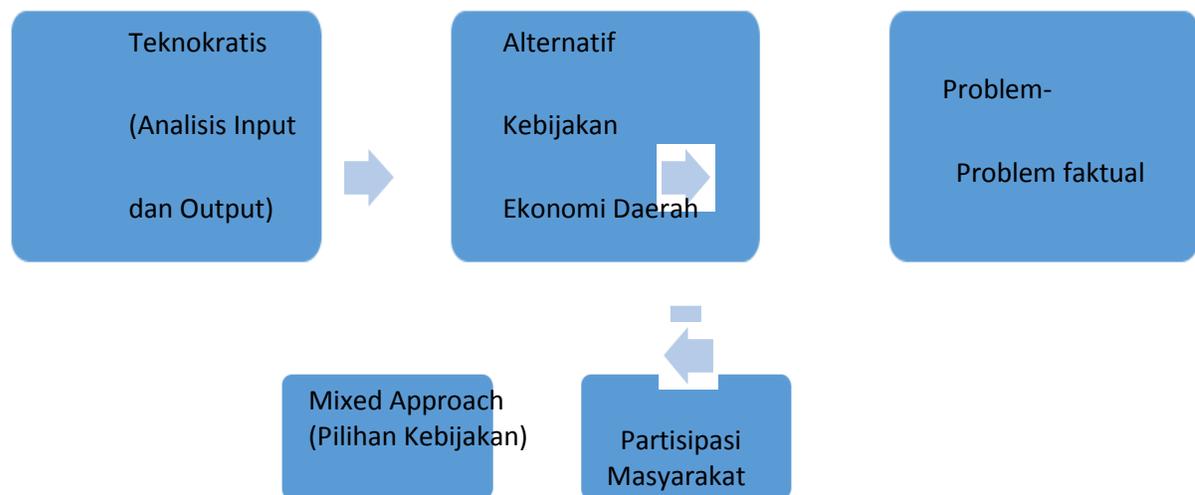
Dalam mengamati respon masyarakat atas proses pembangunan ekonomi daerah harus di perhatikan apa yang terjadi terhadap kondisi perekonomian masyarakat daerah pada saat proses pembangunan. Kondisi ekonomi berhubungan dengan kondisi penyediaan barang dan jasa. Saat membicarakan kondisi ekonomi, dibicarakan pula tentang kondisi yang di rasakan oleh produsen, distributor maupun konsumen barang dan jasa. Informasi mengenai hal ini didapat

terutama lewat media massa dan wawancara dengan masyarakat maupun dengan kepala bagian humas (KABAG HUMAS) di kantor waliKota Depok.

Masyarakat melihat gebrakan kebijakan pembangunan ekonomi daerah yang dilakukan pemerintah Kota Depok. Saat ini menghasilkan dukungan dari berbagai level. Sebelumnya masyarakat

kurang responsif dan tidak memahami makna kebijakan pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan ekonomi, umumnya dalam musyawarah perencanaan pembangunan, program-program yang bertujuan untuk meningkatkan anggaran untuk kesehatan, pendidikan, pelayanan maupun untuk mengentaskan kemiskinan belum menjadi acuan utama, lalu, sedikit demi sedikit, wacananya hamper habis sumberdaya alam di wilayah Kota Depok dan besarnya dorongan pemerintah memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk meningkatkan level kesejahteraannya masyarakat yang pada akhirnya di terima sebagai sesuatu yang realities.

**Gambar 1 Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah Kota Depok Periode 2008 - 2013**



Masyarakat belum bisa merumuskan kebutuhan pembangunan atau masalahnya sendiri, terbukti dalam musyawarah pembangunan masih banyak usulan. Pembangunan sarana fisik yang kurang jelas kemanfaatannya untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

### **Perkembangan dan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Depok**

Pertumbuhan ekonomi adalah perubahan kondisi perekonomian suatu daerah secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama priode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional.

Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa disuatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi maka semakin cepat proses pertambahan output wilayah Kota Depok sehingga prospek perkembangan semakin baik.

**Tabel 1 Pertumbuhan Ekonomi Daerah Kota Depok**

No	Sektor Tingkat Kecamatan	2012	2013	2014	2015
1	Sawangan	6,11	6,71	7,48	14,16
2	Bojong sari	7,45	8,19	9,10	13,30
3	Pancoran Mas	8,30	9,14	10,13	16,00
4	Cipayung	5,25	5,76	6,40	7,35
5	Sukmajaya	7,91	8,61	9,48	14,47
6	Cilodong	17,45	18,97	21,21	35,28
7	Cimanggis	19,27	20,64	22,79	50,99
8	Tapos	10,36	11,26	12,51	23,41
9	Beji	18,90	20,75	23,06	32,76
10	Limo	3,39	3,77	4,19	5,76
11	Cinere	6,24	6,78	7,51	14,73
<b>Jumlah *)</b>		<b>17,60</b>	<b>19,69</b>	<b>21,54</b>	<b>23,05</b>

Keterangan

Angka Tahun 2014 masih bersifat sementara \*\*: Angka Tahun 2015 masih bersifat sementara

Sumber Data Kec : satudata.bappeda.go.id dan Kecamatan Dalam Angka 2013-2016

Sumber Data \*):Depok Dalam Angka 2016. Diolah :*Bid. Statistik dan Persandian, Diskominfo Kota Depok.*

Dengan di ketahuinya sumber-sumber pertumbuhan ekonomi maka dapat di tentukan sektor prioritas pembangunan. Ada tiga faktor atau komponen utama yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu akumulasi modal ( capital accoumulation ) kedua pertumbuhan penduduk ( growth in population ) dan ketiga adalah kemajuan teknologi / *technological progress*

Ada beberapa pertumbuhan ekonomi di masyarakat Kota Depok yang sudah bisa dimanfaatkan dan dirasakan masyarakat sesuai dengan tujuan pemerintah daerah Kota Depok yaitu :

Tujuan bersifat ekonomi

Tujuan untuk mengatasi pengangguran didasarkan kepada pertimbangan – pertimbangan yang bersifat ekonomi. Dalam hal ini ada tujuh pertimbangan utama yakni :

- a. Untuk menyediakan lowongan pekerjaan baru
- b. Untuk meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat dan memperbaiki pemerataan pendapatan perkapita
- c. Meningkatkan pelayanan kesehatan
- d. Meningkatkan kualitas Pendidikan
- e. Meningkatkan industri dan perdagangan
- f. Untuk menyediakan sarana alat transportasi
- g. Menyediakan dan Meningkatkan Tempat wisata
- h. Tujuan bersifat sosial politik
- i. Meningkatkan kemakmuran keluarga dan kestabilan keluarga
- j. Menghindari masalah kejahatan
- k. Mewujudkan kestabilan politik

Salah satu kegiatan penting dalam pertumbuhan ekonomi yang telah dicapai di daerah Kota Depok, Dengan mengamati tingkat pertumbuhan yang tercapai dari tahun ketahun dapatlah dinilai prestasi dan kesuksesan tersebut dalam mengendalikan kegiatan ekonomi dalam jangka pendek dan usaha mengembangkan perekonomian dalam jangka panjang.

Dalam priode ini perekonomian wilayah Kota Depok mengalami pertumbuhan yang relatif pesat. Krisis moneter pada tahun yang lalu ternyata menimbulkan efek bagi pertumbuhan perekonomian di Kota Depok bahkan diseluruh wilayah Indonesia. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia dibawah 5 persen, dan pada tahun berikutnya perekonomian mengalami kemunduran yang sangat tajam output dan input merosot sebesar 13,1 persen.

Dari satu priode ke priode yang lain ternyata faktor-faktor produksi mengalami pertambahan dalam kualitas maupun kuantitasnya. Pertambahan penduduk pada akhirnya akan menambah jumlah tenaga kerja baru, pendidikan dan pengalaman kerja menambah keterampilan dan kemampuan tenaga kerja. Penawaran modal menambah barang-barang modal dan meningkatkan penggunaan teknologi yang lebih modern, keahlian keusahawan akan semakin berkembang, Berbagai perkembangan dan perbaikan terus dilakukan oleh pemerintah Kota Depok baik secara struktural maupun infrastrukural hal ini akan menambah kemampuan untuk memproduksi barang dan jasa.

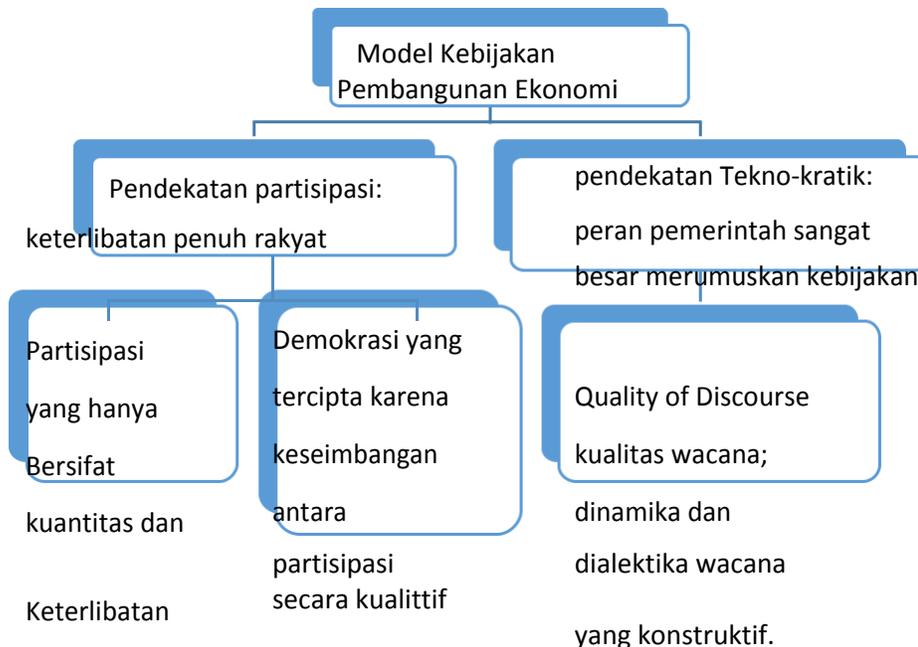
Ada dua alasan yang mendorong mencapainya pertumbuhan ekonomi yang teguh dalam jangka panjang untuk menyediakan kesempatan kerja kepada tenaga kerja yang terus menerus bertambah dan untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat. kedua alasan itu mendorong pemerintahan Kota Depok berusaha untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang teguh diberbagai sektor.

Perbandingan pendapatan perkapita di antara berbagai daerah telah menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang besar dalam taraf kemakmuran daerah maju dan daerah yang sedang berkembang seperti daerah Depok sekarang ini. Beberapa pendapat para ahli ekonomi telah banyak membuat analisis untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat pembangunan ekonomi seperti masalah Institusi, Sosial, Kebudayaan, Politik, kegiatan pertanian yang masih tradisional, kekurangan modal dan tenaga ahli, perkembangan penduduk yang pesat, merupakan beberapa faktor penting yang lainnya, menghalangi tumbuhnya perkembangan ekonomi, belum lagi dibidang teknologi, tingkat pendidikan yang mengalami penurunan, tingkat kejahatan yang tinggi, kesenjangan sosial yang semakin berkembang. Bentuk masalah-masalah tersebutlah yang menjadi

penghambat pertumbuhan ekonomi. Pembangunan ekonomi yang pesat memerlukan situasi politik yang stabil. Di beberapa daerah yang sedang berkembang sosial dan budaya juga besar pengaruhnya kepada pembangunan, cara - cara hidup dan berpikir yang tradisional seringkali menyebabkan masyarakat tidak bertindak secara rasional. Ini penyebab efek buruk kepada pertumbuhan ekonomi. Berbagai bentuk perubahan institusional adalah penting untuk mempercepat dan mempertinggi efisien pembangunan ekonomi. Sistem bank dan institusi - institusi keuangan modern perlu dikembangkan. Perkembangan institusi keuangan akan menjamin efisiensi pengaliran tabungan dari sektor rumah tangga ke para investor. Institusi - institusi pendidikan juga harus dikembangkan untuk menyediakan tenaga terdidik yang diperlukan dalam pembangunan ekonomi. Mempertinggi efisiensi administrasi pemerintah, mengembangkan institusi yang merencanakan dan melaksanakan pembangunan ekonomi dan mengadakan reformasi adalah beberapa perubahan institusional lain yang perlu dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan mempercepat pembangunan ekonomi.

Pemerintahan Kota Depok selalu berupaya memperhatikan kesejahteraan masyarakatnya baik dari segi infrastruktur maupun yang lainnya, oleh karena itu perlu adanya kerjasama antara pemerintahan, umaroh serta melibatkan seluruh lapisan masyarakat dalam menangani dan menyelesaikan masalah masalah yang terjadi dimasyarakat karena dengan cara inilah tujuan dan cita - cita kita bersama dapat tercapai yaitu masyarakat yang sejahtera adil dan makmur baik lahir maupun bathin.

**Gambar 2 Pengembangan Model Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah Kota Depok**



fisik dan kualitas wacana

## **Pembahasan**

Kota Depok dengan mayoritas penduduknya beragama Islam dengan penduduk muslim. Meskipun demikian, didalam kehidupan perekonomian, umat Islam berada pada posisi minoritas. Hal ini disebabkan selain menyangkut etos kerja umat Islam juga berkaitan dengan pemahaman kegiatan ekonomi. Banyak kalangan masyarakat Islam menilai / memahami persoalan ekonomi sebagai persoalan dunia, seolah terlepas dari masalah persoalan agama. Kehidupan duniawi seakan tak punya tali temali dengan agama. Akibatnya persoalan perekonomian merupakan hal yang teralienasi dalam kajian keislaman. Hal itu terbukti dengan jarangnyanya kajian ekonomi yang dipaparkan pada waktu ceramah agama atau pengajian.

Kalau keadaan tersebut berlanjut terus, umat Islam akan menjadi makanan empuk, bagi pengusaha nonmuslim yang minoritas dan dikendalikan oleh kalangan diluar Islam, misalnya ketika menjelang bulan ramadhan dan idul fitri, pengusaha nonmuslim mulai menghitung berapa kebutuhan umat Islam, antara lain kebutuhan primer seperti pakaian, beras, gula, dan terigu, bahkan mereka sudah dapat menargetkan keuntungan yang akan diperoleh, tragisnya lagi, pada saat permintaan umat Islam melonjak, ketika itu pula mereka menaikkan harga terutama masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah Depok dengan secara mikro.

Jawabannya ada pada manusia itu sendiri, sebagai mana firman Allah Swt yang artinya :

*“Sesungguhnya Allah Swt tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mengubah pada diri mereka.”* (QS.Ar-Rad, 13:11”.

Langkah perubahan tingkat perekonomian umat Islam yang ada diwilayah kota khususnya Kota Depok harus dimulai dengan pemahaman ,, bahwa kegiatan ekonomi dalam pandangan Islam merupakan tuntunan kehidupan dan anjuran yang berdimensi ibadah. Rasulullah mengemukakan, seseorang yang berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya adalah orang yang berusaha di jalan Allah Swt selain itu juga di tegaskan bahwa dunia ini adalah lading / kebun tempat mencari bekal dan mempersiapkan diri untuk kehidupan diakhirat kelak.

Memang sudah lama umat Islam terjangkit penyakit pluralisme ekonomi yaitu berada di tengah – tengah sistem ekonomi liberal, komunis dan sosialis. Di satu pihak kita menggerakkan roda pembangunan ekonomi, tetapi lupa membawa pelita agama, karena tidak menguasai syari’at terlebih ilmu fikih muammalah secara mendalam, di lain pihak banyak para ulama yang menguasai ilmu tersebut akan tetapi kurang menguasai dan memantau fenomena ekonomi dan gejolak bisnis di sekelilingnya.

## **Kebijakan Pembangunan Ekonomi Pemerintah Daerah**

Pembangunan kegiatan ekonomi yang dilakukan di Kota Depok, baik pembangunan untuk keluar dari masalah tersebut, seiring dengan perkembangan pembangunan yang bersifat infrastruktur maupun non infrastruktur yang sedang berjalan untuk kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat khususnya Kota Depok dan umumnya negara kesatuan republik Indonesia yang kita cintai ini.

Berkaitan dengan keseluruhan hasil penelitian yang telah dilakukan dan sesuai dengan rumusan masalah serta tujuan penelitian tersebut, maka kajian ini telah menyimpulkan sebagai berikut :

Dalam kebijakan pembangunan ekonomi daerah pemerintahan wali Kota Depok ini, pembangunan lebih ditekankan pada pengadaan sarana fisik dan non fisik serta melakukan eksploitasi baik sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia itu sendiri, karena kalau tidak diperbaharui dan di tingkatkan akan terjadi dampak tingkat kemiskinan, keterbelakangan kesenjangan sosial, tempat wisata, pendidikan, kesehatan dan transportasi pertanian dan

perkebunan serta perdagangan di tambah lagi adanya ledakan penduduk, tingginya angka pengangguran dan sebagainya.

Pembangunan fisik dan non fisik yang dilakukan pada priode sebelumnya kurang dirasakan oleh masyarakat karena tidak memperhitungkan pembangunan jangka panjang untuk meningkatkan ekonomi masyarakat Itu dapat dibuktikan dengan banyaknya gedung, jalan raya, tempat wisata jembatan dan lainnya yang sudah rusak bahkan terabaikan, karena kurangnya perawatan.

Orientasi pembangunan ekonomi sekarang ini yang dilakukan oleh pemerintah daerah waliKota Depok adalah memadukan pembangunan fisik yang bisa menggerakkan pembangunan non fisik untuk kesejahteraan masyarakat, pada priode ini lebih ditekankan pada sektor, pertanian , perkebunan, peternakan perdagangan, perumahan layak huni, tempat wisata, kesehatan, tempat ibadah, transportasi, sektor industri, pendidikan baik formal maupun non formal, serta pelayanan sosial dan pendapatan perkapita yang tinggi.

Menampung dan membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat, Hal tersebut didasari dengan adanya analisis, menggunakan pendekatan analisis *input-output* dan analisis ilmiah SWOT terhadap kebijakan yang telah dibuat dan dilaksanakan. Persoalan ekonomi pada masyarakat yang masih dalam tingkat kemiskinan dan pengangguran mengharuskan kebijakan ekonomi daerah harus berorientasi pada kesejahteraan untuk menuju anggaran yang berbasis pada (*social equity*). artinya pecermatan tentang perekonomian masyarakat. Proses pembuatan dan pengambilan kebijakan pembangunan ekonomi Islam tentunya sangat berbeda antara priode yang lalu dengan priode sekarang ini.

Di era pemerintahan sekarang ini sudah mulai menentukan arah masyarakat pembangunan dengan meningkatkan partisipasi masyarakat. Namun, demikian masyarakat masih memaknai pembangunan menjadi hal mutlak sebagai pemenuhan sarana fisik semata. Ada skala prioritas yang kadang berbeda ditemukan antara yang di rumuskan pemerintah dan masyarakat, dalam hal ini pemerintah mensosialisasikan tentang kemungkinan habisnya sumberdaya alam yang dimiliki jika tidak segera diantisipasi saat ini dengan membuka lapangan kerja baru, masyarakat pada umumnya sangat mendukung wacana ini.

Dalam hal tersebut, hubungan antara keduanya dapat dipahami sebagai sinergi di mana masing-masing menjadi bahan bagi terciptanya produk kebijakan pembangunan ekonomi daerah yang lebih terarah dan lebih bermutu, pada akhirnya akan muncul ide dan gagasan baru, melalui pendekatan secara rasional yang lebih tepat dan optimal.

Pertimbangan yang selama ini digunakan dalam memotret dan memahami serta potensi yang dimiliki pemerintahan daerah waliKota Depok dengan kelemahannya diberbagai sektor dapat ditarik kesimpulan, apabila partisipasi masyarakat secara kuantitas maupun kualitas yang seimbang, maka posisi pemerintah dalam proses pembangunan ekonomi daerah berkedudukan sebagai fasilitator.

Belajar dari kasus yang di teliti tersebut, dapatlah di kaji dan diambil maknanya mengenai bagaimana kebijakan pemerintah dirumuskan, dijalankan dan dinilai dapat pula dipelajari bahwa pendekatan partisipatif dalam pembangunan ekonomi daerah Kota Depok tidak dapat digunakan secara murni dalam struktur sosial dan budaya masyarakat, Dalam perspektif keadilan sosial, hasil penelitian ini untuk memahami sejauh mana pemerintah merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang berorientasi pada melayani masyarakat bukan semata – mata mempertimbangkan kepentingan pasar atau kepentingan ekonomis, melainkan melalui pertimbangan keadilan sosial (*social equity*). Dalam pengembangan Sumber Daya Masyarakat ( SDM ) secara umum hal tersebut bisa dilakukan dengan meningkatkan kualitas pendidikan, Melakukan pemerataan pendidikan

sesuai dengan kondisi wilayahnya serta melakukan perbaikan dan penambahan sarana dan prasarana pendidikan.

### **Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Ekonomi Daerah**

Apabila partisipasi masyarakat baik secara kualitas maupun kuantitas yang tinggi maka dibutuhkan model pendekatan campuran mixed approach ( teknokratis dan partisipatif ) dalam proses perumusan kebijakan pembangunan ekonomi daerah yang menekankan aspek teknokratis dimana peran pemerintah (elit) lebih menonjol, sebaliknya jika partisipasi masyarakat baik dalam konteks kuantitas maupun kualitas seimbang, maka posisi pemerintah dalam proses pembangunan ekonomi daerah berkedudukan sebagai fasilitator. Dalam rangka untuk melahirkan ideal democracy dalam konteks pembangunan ekonomi daerah diperlukan pertimbangan antara *quality of discourse* dan *quantity of participation* hal tersebut merupakan konsep yang tepat dan bisa dipraktekan dalam kondisi masyarakat yang aktif dalam pembangunan ekonomi Islam.

### **Pemberdayaan Masyarakat Secara Berkelanjutan**

- a. Melakukan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan. Hal tersebut bisa dilakukan dengan cara
- b. Meningkatkan dialog antara publik dan birokrat untuk mengetahui apa sebenarnya kebutuhan masyarakat.
- c. Memberikan fasilitas yang bisa memancing kreatifitas masyarakat untuk mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya dan bukan memberikan fasilitas yang bersifat memanjakan.

Pemberdayaan tersebut bisa dilakukan dalam berbagai forum penyusunan rencana pembangunan yang melibatkan pemerintah dan masyarakat. Pemerintah berupaya terus menerus mengembangkan kuantitas dan kualitas dalam berpartisipasi masyarakat agar dalam proses kebijakan pembangunan ekonomi daerah bisa dilakukan oleh pemerintah dan bisa dilaksanakan oleh masyarakat dalam rangka menciptakan tujuan kesejahteraan masyarakat yang berdimensi keadilan sosial.

### **Kebijakan Diverifikasi**

Kebijakan pemerintah untuk membangun perekonomian dengan cara mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat di berbagai sektor yang baru dan lebih modern. Kemakmuran masyarakat, suatu ukuran yang menunjukkan taraf kehidupan rata - rata yang telah dicapai oleh masyarakat dalam sesuatu daerah. Pendapatan perkapita selalu digunakan sebagai ukuran kasar untuk menunjukkan taraf kemakmuran yang dicapai suatu masyarakat.

Cara yang lebih tepat dalam menunjukkan taraf kemakmuran masyarakat adalah dengan melengkapi data perkapita dengan informasi lain seperti perbedaan dalam biaya hidup, distribusi pendapatan, tersedianya fasilitas fublik untuk khalayak ramai seperti telepon, sistem jalan raya, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan dan sebagainya. Pembangunan ekonomi hanya akan tercapai apabila pendapatan perkapita masyarakat terus menerus bertambah pada tingkat yang cukup cepat.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Dari kesimpulan tentang Implementasi Pemerintah Kota Depok melalui pendekatan partisipatif dan teknokrat, bahwa kebijakan pembangunan ekonomi baik dilihat dari segi infrastruktur dan struktural. Transportasi, pendidikan, sosial, budaya, taman wisata, teknologi pertahanan dan keamanan beragama.

Sudah mulai terlihat dari segi keberhasilannya setelah terlepas atau terpisah dari kabupaten Bogor, hal ini dapat diukur dari pendapatan perkawita masyarakat Kota Depok yang sudah mulai membaik, kualitas Sumber daya Manusia yang sudah mulai meningkat serta sarana dan prasarana baik infrastruktur dan struktural pemerintahan yang sudah dirasakan oleh masyarakat Kota Depok. Suatu birokrasi pelayanan kepada masyarakat yang semakin efisien, banyak hal yang perlu kita cermati dan pembelajaran beberapa persoalan-persoalan yang kita hadapi dilingkup masyarakat Depok.

Selain itu, secara teknis rekomendasi lain dari penelitian ini terkait dengan apa yang seharusnya dilakukan (das sollen) pemerintah daerah yang menghadapi masalah menerapkan model pendekatan dalam kerangka melakukan program pembangunan ekonomi daerah terkait dengan peningkatan ekonomi kesejahteraan masyarakat dalam melakukan revitalisasi pada lembaga ekonomi daerah seperti daerah, KUD dan swasta lainnya. Revitalisasi bisa dilakukan dengan memperkuat kelembagaan ekonomi daerah, seperti lembaga keuangan desa, Bank Pembangunan daerah Syari'ah, Perdagangan, Perkebunan, Industri, Transportasi, Peternakan, hal tersebut masih belum optimal dan belum cukup untuk menopang ekonomi pendapatan asli daerah secara signifikan. Untuk mencapai kemajuan perkembangan ekonomi masyarakat yang diinginkan, tantangan ini sangat berat karena terkait dengan penyediaan sumberdaya manusia yang juga harus kompeten dalam mengelola manajemen tersebut.

Setelah pemaparan tersebut diatas, dapat kita ketahui bahwa dalam kehidupan ekonominya manusia memiliki masalah-masalah yang cukup rumit. Dan sebagai solusinya, Islam telah menawarkan konsep-konsep yang berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dengan demikian, semakin terbukti bahwa ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang paling sempurna.

### **Saran - saran**

Berdasarkan hasil penelitian tersebut penulis mengharapkan marilah kita tingkatkan pembangunan ekonomi Islam di daerah kita masing – masing yang bertujuan untuk meningkatkan dan memberikan kesejahteraan masyarakat kita baik secara struktural maupun infrastrukural sesuai dengan bunyi pasal 33 ayat 1,2 dan 3 UUD 1945. Serta memberikan kebijakan – kebijakan dalam meningkatkan pembangunan ekonomi di masyarakat, sehingga pendapatan perkapita bertambah tinggi dan kesejahteraan dapat di rasakan oleh masyarakat melalui :

- a. Menciptakan lapangan pekerjaan di berbagai sektor.
- b. Meningkatkan daya beli masyarakat untuk memenuhi kebutuhan baik kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder dan lux/tersier.
- c. Mengurangi pengangguran dan mengantisipasi ledakan penduduk.
- d. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui pendidikan baik formal maupun non formal.
- e. Meningkatkan keterampilan masyarakat menjadi produktif dan tidak konsumtif.
- f. Memberikan kemudahan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.
- g. Meningkatkan tarap hidup masyarakat yang lebih baik diberbagai segi kebutuhan
- h. Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
- i. Memperbaharui dan meningkatkan pertanian serta perkebunan di masyarakat
- j. Meningkatkan keamanan dan kenyamanan dalam beribadah bagi masyarakat

**DAFTAR PUSTAKA**

- Azmi, Sabahuddin, (2002) *Islamic Ecomic: Public Finance in Early Islamic Thought*, New Delhi: Goodword Books,
- Mazmanian dan Sabatier dalam bukunya Agustino(2008:196) penerbit Aksara Jakarta.
- Hidayat, Muhammad. (2010). *The Sharia Economic, Pengantar Ekonomi Islam*. Jakarta: Abdullah, Boedi. (2010).*Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Abdul Wahab, Solichin Putra dan Saiful Arif 2002. Dalam buku (*Masa depan Otonomi Daerah*).Penerbit Jakarta Bumi Aksara.
- Safi'l. (2002) ( *Paradigma Baru Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah*
- Brata, Aloysius Gunardi. 2004 *Nilai Ekonomis Modal Sosial pada Sektor Informal*. Jakarta Lembaga Penelitian Universitas Atma Jaya.
- Hardiman, Fransiscus – Budi, 1993. *Menuju Masyarakat komunikatif : Ilmu, Masyarakat*, Yogyakarta.
- Hariyono, (2003). “ *Ekonomi Sebagai Strategi Pembangunan Pancasila.*” *Jurnal Ekonomi Rakyat*.
- Kartasasmita, Ginanjar .(1996). *Pembangunan Untuk Rakyat, Memadukan pertumbuhan dan Pemerataan* Jakarta CIDES.
- Buku Pedoman Mitra Niaga. (1977). *Ahad-Net Multilevel Marketing*. Jakarta.
- Saud Mahmud Abu, (1991). *Garis-Garis Besar Ekonomi Islam. (GBEI)*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Siddiqi, Muhammad Nejatullah. (1991). *Kegiatan Ekonomi Dalam Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Tadjoeddin, Achmad Ramzy, dkk. (1992). *Berbagai Aspek Ekonomi Islam*. Yogyakarta:
- Ya'kub, Hamzah.(1992). *Kode Etik Dagang Menurut Islam, Pola Pembinaan Hidup Dalam Berekonomi*. Bandung: Diponegoro.
- Yusuf, Muhammad dan Wiroso.(2007). *Bisnis Syariah*, Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Tadjoeddin, Ahmad Ramzy, dkk (1992). *Berbagai Aspek Ekonomi Islam* Yogyakarta. Tiara Wacana UI
- Abdullah, Boedi. (2010).*Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*. Bandung: Pustaka Setia